

***Palembang Shi* pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945**

ARMA MITA

Universitas Sriwijaya
Email Korespondensi: armaarta175@gmail.com

Abstract

This study investigated about the Japanese military rule in the city of Palembang in 1942 to 1945, especially regarding the rule of Palembang *Shi* (Municipality). In this study, it will cover some of the main points of the study those are how the Japanese military rule formed the Palembang *Shi* rule, the structure of Palembang *Shi* rule and the policies that were passed during that reign. Therefore, the period of Japanese government in Indonesia it had a unique distinction that must have been different during the colonization of the earlier Dutch Indian government and its civil society. The differences in those government that was also became a distinct feature of this study which is certainly very interesting for us to consider and to learn more carefully. Naturally this study aims to add our insight into the history of the government development in the city of Palembang.

Keywords:
Government;
Japan;
Palembang Shi

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemerintahan militer Jepang di kota Palembang pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, khususnya mengenai pemerintahan *Palembang Shi* (Kotapraja). pada penelitian ini akan dibahas beberapa poin utama kajian studi yakni mengenai proses terbentuknya pemerintahan *Palembang shi* oleh pemerintah militer Jepang, struktur pemerintahannya dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan tersebut, oleh karna itu perodesasi masa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki keunikannya tersendiri yang tentunya berbeda pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda sebelumnya dengan pemerintahan sipilnya. Perbedaan pemerintahan ini jugalah yang akhirnya menjadi

Kata Kunci:
Jepang;
Palembang Shi;
Pemerintahan

Pengantar

Periode masa pendudukan Jepang tahun 1942 sering kali di anggap sebagai periode masa yang sangat singkat dan sering kali dianggap tidak memiliki sejarah serta tidak begitu banyak cerita, namun meskipun begitu tidak bisa kita tutupi bahwa dengan periode waktu yang cukup singkat ini Jepang telah memberikan sebuah cerita baru dalam pembabakan periodisasi sejarah di Indonesia.

Palembang merupakan wilayah yang dianggap memiliki nilai strategis bagi pemerintahan Jepang selain dari pada sumber tambang berupa minyak buminya yang dapat di gunakan sebagai sumber minyak pasukan Pasifik dan Asia Selatan, wilayah Palembang juga dianggap sebagai jalan masuk Jepang untuk dapat menguasai pulau Jawa (Nasution, 1977: 83). Gadjahnata (2000: 5) mengatakan bahwa tentara Jepang menduduki kota Palembang pada tanggal 14 Februari 1942 melalui serangan udara, tentara Jepang menurunkan tentara payungnya atau biasa disebut juga dengan istilah pasukan Parasut dan sehari setelahnya tentara Jepang mengirimkan pasukan *Kaigunnya* (Angkatan Laut) untuk dapat masuk ke Kota Palembang melalui Sungai Musi. Dengan masuknya tentara Jepang ke kota Palembang maka hal ini berdampak pula pada struktur birokrasi pemerintahan di kota Palembang yang sebelumnya dalam penguasaan pemerintah kolonial Belanda, Palembang ditetapkan sebagai sebuah wilayah otonom yang dikenal dengan istilah *Gameente* yang berlaku sejak tahun 1906 sampai dengan tahun 1942, hal ini menandakan bahwa kota Palembang telah di perbolehkan untuk mengelola daerahnya sendiri dengan di kepalai oleh seorang *Burgemeeste* (Wali kota) dan ketika berada di bawah penguasaan pemerintah Jepang, Palembang berubah menjadi sebuah wilayah otonom yang difungsikan sebagai daerah perekonomian sekaligus daerah militer yang disebut dengan istilah *Palembang Shi* (Wali kota). Menurut Hanfiah (1988: 17) *Palembang Shi* pada dasarnya adalah kelanjutan dari *Standsgemeente* dengan *Burgemeesternya* namun terdapat beberapa perbedaan antara *Gameente* dan *Palembang Shi*, Perbedaan itu diantaranya adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda *Burgemeeste* hanyalah bagian dari *Standsgemeente*, sehingga kedudukannya tidak dualistis. Urusan pamong praja tidak termasuk dalam *Standsgemeente*. Sementara itu kekuasaan seorang *Shi-co* pada masa pemerintahan Jepang di antaranya adalah mengurus urusan rumah tangga dan juga urusan pamong praja di dalam wilayah *Shi* sehingga kedudukannya menjadi dualistis, kemudian seorang *Shi-co* juga memegang organ pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan yang sebelumnya diurus oleh *Hoofd Demang*, *District Hoofd*, *Onderdistrict Hoofd*, *Wijkmeester*, serta para kepala kampung yang ada di dalam wilayah *Shi* masuk ke dalam kekuasaan *Shi-co*. Tak hanya itu seorang *Shi-co* juga diperkenankan untuk membuat undang-undang yang dilandasi pada *Osamu Seirei* No.13. (Hanafiah, dkk. 2001: 35)

Pada masa pemerintahan Jepang di Palembang ketika Palembang dijadikan sebagai sebuah wilayah Keresidenan yang dikenal dengan istilah *Syu*,

Palembang diberikan sebuah keistimewaan khusus untuk dapat membentuk sebuah system birokrasi baru dan diperbolehkan untuk mengatur wilayahnya sendiri yang disebut dengan istilah *Palembang Shi*, Palembang dipimpin oleh seorang *Shi-co* yang merupakan seorang wali kota, yang memiliki kekuasaan lebih besar dibanding seorang *Burgermeeste* pada zaman Pemerintahan kolonial Belanda (Irwanto, 2010: 54).

Pada Masa Pemerintahan Jepang ini banyak sekali terjadi perubahan yang menyangkut berbagai aspek salah satunya adalah di bidang struktur pemerintahan di mana jabatan seorang wali kota (*Syi-co*) Menjadi lebih dualisits dan dapat membuat aturan undang-undangnya sendiri serta berbagai kebijakan lainnya yang ditetapkan pada masa *Palembang Shi* di antaranya adalah di bidang pemerintahan yang menyangkut aspek wilayah seperti pemisahan wilayah seberang ulu dari wilayah *Shi*. Kebijakan lainnya yang di keluarkan oleh pemerintah Jepang adalah di bidang pembangunan dan infrastruktur di mana pemerintah Jepang juga melakukan perluasan “ruang daratan” guna mempermudah akses birokrasi di Palembang nantinya. (Irwanto, 2010: 54-55). Sementara itu di bidang struktur pemerintahan sendiri Palembang tetap menjadi sebuah wilayah keresidenan namun mengalami perubahan dalam struktur pemerintahannya di mana pada masa Belanda dengan *Gameentnya* Palembang menjadi sebuah wilayah sipil dan pada masa Jepang dengan *Palembang shi* nya Palembang berubah menjadi sebuah wilayah yang berbasis pada kemiliteran yang diperuntukan menjadi sebuah wilayah penyokong ekonomi pemerintah Jepang.

Beberapa permasalahan pokok yang akan di bahas di dalam penelitian ini diantaranya adalah mengenai agaimana proses ditetapkannya Palembang sebagai *Palembang Shi*, Bagaimana Susunan dari Struktur Birokrasi *Palembang Shi* dan apa saja Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *Palembang Shi*.

Kedatangan Jepang di Palembang

Pada awal abad ke 20 Jepang sudah mulai bangkit menjadi sebuah Negara yang besar dan patut diperhitnungkan sebagai salah satu Negara yang memilki pengaruh serta kekuatan yang besar. Hal ini terlihat dalam niat pemerintah Jepang yang ingin membentuk sebuah Negara Asia timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Semangat ini tentunya tidak terlepas dari peristiwa perang dunia I yang turut memberikan dorongan bagi industri dan perdagangan Jepang. Menurut Moedjanto (1988: 66) sudah dari awal abad ke 20 Jepang telah menjadi lebih imperialistis hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah Jepang dihadapkan pada sebuah permasalahan mengenai kepadatan penduduk yang diakibatkan oleh kemajuan di bidang industri. Adanya pembatasan imigrasi ke wilayah Australia dan Amerika Serikat membuat Jepang semakin bersemangat untuk menjalankan niat Imperialis Modernnya.

Dalam usahanya untuk membangun sebuah imperium itu Jepang menargetkan wilayah Asia yang kemudian akan melahirkan suatu perang besar yang sering dikenal dengan istilah Perang Asia Pasifik. Perang Asia Pasifik ini sendiri adalah perang yang semata-mata dilakukan oleh Jepang agar dapat membentuk suatu imperium besar di wilayah Asia. (Poesponegoro, 2011: 1). Untuk mendukung hal tersebut maka pada tanggal 8 Desember tahun 1941 Jepang melakukan penyerbuan ke pangkalan armada Amerika Serikat di kawasan Pasifik yakni Pearl Harbour. Dengan berhasil diserangnya daerah pertahanan musuh di kawasan Asia Pasifik ini, maka rasa percaya diri Jepang semakin tinggi dan dimulailah invansi Jepang ke Indonesia. Pasukan Jepang sendiri pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di wilayah Tarakan Kalimantan Timur, setelah dari Tarakan berturut-turut wilayah di Kalimantan dapat di duduki oleh pasukan Jepang.

Dari Kalimantan Jepang meneruskan penyerbuannya ke wilayah Sumatera dan Palembang menjadi wilayah pertama yang masuk dalam daftar penyerbuan Jepang di wilayah Sumatera. Penyerbuan Jepang ke Palembang sendiri dilakukan oleh tentara ke XXV yang bermaskas besar di wilayah Singapura yang kemudian di tahun 1942 pusat markas tentara ke XXV di wilayah Sumatera di tetapkan di daerah Bukit Tinggi di bawah pimpinan Letnan Jendral Yamatshita Ttomoyuki. Kota Palembang menjadi kota yang sangat penting bagi pemerintah militer Jepang karena akses untuk menguasai pulau Jawa adalah melalui Palembang dan untuk wilayah kota Palembang sendiri berhasil di kuasai oleh pemerintah militer Jepang pada tanggal 14 Februari 1942 di mana pasukan tentara Jepang saat itu memasuki wilayah kota Palembang melalui serangan udaranya yang cepat dan terorganisir, tentara Jepang menurunkan pasukan tentara payungnyanya terlebih dahulu di wilayah kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong. Selain menurunkan tentara payungnya untuk dapat menguasai kota Palembang, keesokan harinya pemerintah Jepang juga mengerahkan pasukan armada angkatan lautnya yang bernama *Kaigun* untuk dapat semakin mengokohkan dirinya, pasukan *Kaigun* ini memasuki kota Palembang melalui jalur perairan Sungai Musi (Gadjahnata, 2000: 5).

Dalam penyebuannya ke wilayah kota Palembang, Jepang sangat berhati-hati sekali, Jepang tidak ingin pemerintah Hindia Belanda membumi hanguskan kawasan kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong sehingga strategi yang di terapkan oleh Jepang pun sangat mendetail sekali. Nasution (1977: 83) mengatakan bahwa penyerbuan pasukan tentara Jepang ke Palembang di lakukan dengan menurunkan pasukan tentara payung yang jumlahnya lebih kurang satu batalyon atau berjumlah sekitar 700 sampai 1000 personil pasukan tentara. Lebih rinci dijelaskan lagi bahwa pemerintah militer Jepang juga menurunkan sebanyak 360 penerjun payungnya yang berasal dari 1 resimen parasut pada tanggal 14 Februari 1942 dan tambahan 100

pasukan penerjun payung mendarat di kota Palembang pada keesokan harinya dan pada tanggal 16 Februari pemerintah militer Jepang terus menambah pasukannya kewilayah Palembang dengan kembali mengirim 229 resimen di tambah dengan satu battalion dari 230 resimen yang datang melalui jalur Sungai Musi (<http://beritapagi.co.id/2018/06/18/battle-of-palembang-kisah-penyerangan-pasukan-jepang-di-kilang-minyak-plaju.html> diakses 08-04-2018). Hal ini menyebabkan pasukan tentara Belanda tidak dapat melaksanakan rencana bumi hangusnya. Kekuatan tentara Belanda sendiri saat itu tidak lebih dari satu batalyon. Sementara itu pasukan bantuan Belanda dari Jakarta yakni Batalyon 10 KNIL terlambat datang dan justru memilih mundur ke wilayah Prabumulih dan bergerak mundur kembali ke Jakarta dengan menumpang kapal dari wilayah Tanjung Karang.

Proses Pembentukan *Palembang Shi*

Pemerintah militer Jepang telah merancang sedemikian rupa pola pembagian kekuasaan di Indonesia dan membaginya menjadi tiga wilayah kekuasaan, yakni :

1. Jawa dan Madura yang berada di bawah pemerintahan militer Angkatan Darat Jepang ke 16 yang berkedudukan di Jakarta.
2. Sumatera yang berada di bawah pemerintahan militer Angkatan Darat Jepang ke 25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi (sebelumnya berkedudukan di Singapura)
3. Kepulauan-Kepulauan lain di Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi) yang berada di bawah komando pemerintahan angkatan laut (Kaigun) Jepang, yang berkedudukan di Ujung Pandang (Makassar).

Daerah Sumatera merupakan daerah yang sangat berarti bagi pemerintahan militer Jepang hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Zed (2005: 12) yang mengatakan bahwa wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya merupakan daerah inti di kawasan selatan, dan apabila Jepang mundur di wilayah Sumatera maka Jepang kehilangan kesempatan untuk dapat menaklukkan Hindia Belanda. Sumatera begitu penting bagi pemerintah militer Jepang karena wilayah Sumatera merupakan wilayah yang sangat strategis terletak di antara jalur silang pertemuan kawasan timur dan barat di Asia Tenggara. Selain itu wilayah Sumatera juga akan dijadikan sebagai wilayah basis pertahanan militer Jepang terhadap sekutu sebab pemerintah Jepang telah memperkirakan bahwa ancaman seragan dari pihak sekutu akan datang dari wilayah barat yakni Sri Lanka, oleh sebab itulah pusat pertahanan pemerintah militer Jepang harus dipusatkan di wilayah Sumatera.

Palembang Secara resmi ditetapkan sebagai *Palembang Shi* pada tanggal 23 Maret 1942 bersamaan dengan Pelantikan *Shi-co* yang pertama yakni Syucia dan Sekretaris *Shi-Co* Ir. Ibrahim Zahir (Hanafiah, 2001: 36) hal ini berdasarkan pada keputusan tentara Angkatan Darat ke 25 yang berkedudukan

di Bukit Tinggi yang mengeluarkan keputusan tentang membagi wilayah Sumatra menjadi sepuluh keresidenan yang disebut dengan istilah *Shu*, adapun kesepuluh *shu* tersebut yakni Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Banga Belitung (Zed, 2005: 18). Pernyataan di atas diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang pembentukan wilayah *Shi* dan *Ken* oleh pemerintah militer Jepang yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah *Osamu Seirei*, keputusan tersebut teruang dalam *Osamu Seirei* no. 27 tahun 2602 (1942) tentang pembagian wilayah di dalam sebuah *Shu* yang termuat dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah) No. 13 bulan Agustus tahun 2602 (tahun 1942) di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa daerah *Shi* sama dengan daerah *Stadsgemeente* dahulu, artinya wilayah kota Palembang yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda berstatuskan wilayah *Stadsgemeente*, maka secara resmi juga kota Palembang ditetapkan sebagai *Palembang Shi* pada masa pemerintahan militer Jepang.

Undang-undang lainnya yang memperkuat status kota Palembang menjadi sebuah wilayah *Palembang Shi* pada masa pemerintahan militer Jepang juga tertuang dalam *Osamu Seirei* no. 12 tahun 1943 tentang wilayah *Ken* dan *Shi* yang termuat dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah) No. 18 tanggal 29 bulan April tahun 2603. Keputusan yang dikeluarkan oleh tentara angkatan darat ke 25 ini juga berbarengan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh tentara angkatan darat ke 16 di Jawa yang berpusat di Jakarta, bedanya adalah jika di Sumatera terbagi menjadi 10 keresidenan maka di Jawa terbagi menjadi 17 keresidenan, adapun dasar hukum dari keputusan ini adalah berdasarkan pada undang-undang No. 27 tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah (Pespongoro, 2011: 19).

Pemerintah Militer Jepang kemudian mengeluarkan kebijakan lainnya tentang pembentukan wilayah *Shi* di mana untuk daerah *Shu* atau keresidenan yang pernah menjadi sebuah wilayah kotapraja yang diatur oleh *stadsgemeente* maka daerah tersebut menjadi daerah *Shi* (Sagimun, 1985: 31) khusus untuk kota Palembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah menjadi sebuah wilayah kota praja yang disebut dengan istilah *Gameente* dan ditetapkan berdasarkan *staatsblad* no 126 tanggal 1 April tahun 1906 maka dari itulah akhirnya pada masa pemerintah militer Jepang Palembang ditetapkan menjadi *Palembang Shi* dan tinggal meneruskan birokrasi yang ada sebelum akhirnya mengalami perkembangan lebih lanjut.

Wilayah Palembang Shi

Pada dasarnya wilayah *Palembang Shi* sama dengan wilayah *Gameente* pada masa pemerintahan Hindia Belanda hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti misalnya jika pada masa pemerintahan Hindia Belanda wilayah kota Palembang dibedakan menjadi dua distrik yakni distrik seberang ulu dan distrik seberang ilir maka pada masa pemerintahan militer Jepang wilayah

kota Palembang tidak lagi dibedakan menjadi wilayah seberang ulu dan seberang ilir semuanya menjadi satu wilayah yang sama yakni *Palembang Shi* hanya saja khusus untuk wilayah pengilangan minyak yang ada di kota Palembang seperti wilayah Sungai Gerong dan Plaju tidak termasuk ke dalam wilayah *Palembang shi* melainkan masuk ke dalam wilayah *Asano Butai* dan berada langsung di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang yang berkedudukan di Singapura (Hanafiah, 1988: 18)

Selain itu juga terjadi perluasan wilayah di beberapa tempat seperti misalnya:

- 28 km² meliputi wilayah Marga Pemulutan, Marga Parit dan Tanjung Raja Gun
- 16 km² meliputi wilayah Marga Rambutan Kayu Agung Gun
- 26 km² meliputi wilayah Marga Sungai Renggas dan Palembang Gun
- 13,5 km² meliputi wilayah Marga Gasing dan Palembang Gun
- 31,5 km² meliputi wilayah Marga Talang Kelapa dan Palembang Gun

Perluasan wilayah kota ini di dasarkan pada peraturan *Syucookan* yakni *Palembang Shu Rei* No.1 tahun 2604 tahun Jepang atau Undang-undang no. 1 tanggal 13 Maret tahun 1944 (Hanafiah, 2001: 38). Dapat dikatakan bahwa wilayah *Palembang Shi* sedikit lebih luas dari pada wilayah Gamentee pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Stuktur Pemerintahan *Palembang Shi*

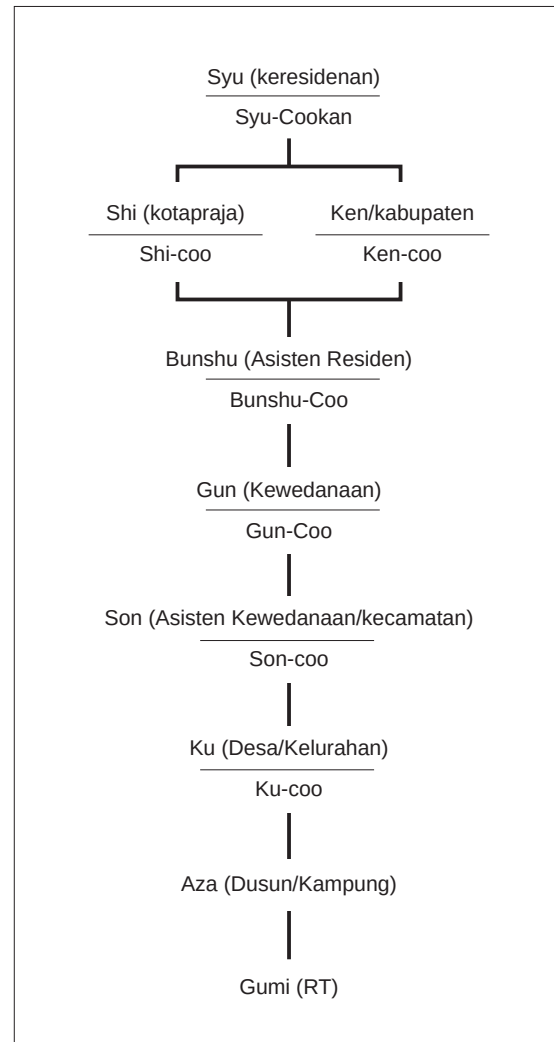
Terdapat perbedaan antara struktur pemerintahan pada masa pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang yang mana perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu banyak, perbedaan tersebut terletak pada tingkat satuan birokrasi yang terdapat pada masa pendudukan militer Jepang, pada masa pemerintahan militer Jepang ternyata struktur pemerintahan lebih mendalam bahkan sampai kepada tingkat satuan terkecil yakni RT. Selain perbedaan di atas terdapat juga perbedaan antara tugas seorang walikota pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan Pemerintah militer Jepang, perbedaan tugas ini menurut Hanafiah (1988: 7-17) mengatakan bahwa jika seorang *Burgermeeste* pada masa pemerintahan Hindia Belanda hanya bagian dari organ *stadsgemeente* dan kedudukannya tidak dualistis di mana urusan kepamong prajaan tidak menjadi bagian dari seorang walikota, tugas seorang *Burgermeeste* sendiri hanyalah berkaitan dengan pengawasan status pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan jalan-jalan umum, taman dan kepentingan-kepentingan umum lainnya, kemudian tugas selanjutnya adalah melakukan usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan terakhir adalah membuat dan mengatur tempat-tempat penguburan sementara pada masa *Palembang shi* kedudukan seorang *shi-co* menjadi dualistis di mana selain mengurus urusan rumah tangga daerah juga mengurus masalah ke pamong prajaan, seorang *Shi-co* juga merupakan bagian dari pemerintahan pusat

dan wilayah yang di urusi oleh seorang *shi-co* juga mencakup wilayah *gun*, *son*, *ku*, *aza* dan *gumi*. Seorang *shi-co* juga diperbolehkan untuk membuat dan menetapkan Undang-undang yang dirasa perlu untuk mengatur wilayahnya. Adapun Struktur pemerintahan Palembang Shi pada tahun 1942-1945 adalah seperti ditunjukkan pada figur 1.

Wilayah keresidenan Palembang pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang disebut dengan istilah *Syu* yang dijabat oleh seorang Jepang dengan Gelar *Syucookan* kemudian di bawah *Syu* terdapat wilayah kotapraja yang dikenal dengan istilah *Shi*, *Shi* sendiri berkedudukan di ibukota keresidenan sementara untuk daerah di luar ibukota keresidenan disebut dengan istilah *Ken*. Untuk Palembang sendiri jabatan di wilayah *Shi* juga dijabat oleh orang Jepang dan dikenal dengan sebutan *Shi-coo* (Walikota) dengan didampingi oleh asistennya. *shi-co* bertanggung jawab penuh kepada seorang *Syucookan*. Dalam melaksanakan tugasnya seorang *Syucookan* di bantu oleh seorang asisten yang disebut dengan *Bunshu* dan di kenal dengan istilah *Bunshu-co*, kemudian di bawah *Shi* terdapat *Gun* dan sampai pada struktur terkecil dalam pemerintahan adalah *Gumi* atau yang kita kenal dengan istilah RT saat ini. *Gun*, *sen*, *ku*, *aza* dan *gumi* semuanya bertanggung jawab ke pada *shi-co* (Abdullah, 1991:156)

Dalam menjalankan tugasnya seorang *Syucookan* juga dibantu oleh *Naseibu* (Kepala bagian pemerintahan) ialah yang dijabat oleh seorang *Shi-co* (walikota) kemudian *Keisabu* (Kepala bagian perekonomian) dan *Keisatsubu* (kepala bagian Kepolisian). Raden Mutoro, dan Raden Muhammad Mursodo merupakan anggota dari pejabat kepolisian dan Assari menjabat sebagai pejabat kepala kepolisian (Zubir, 2012: 56) sementara itu untuk departemen sendiri di Palembang hanya terdapat 3 departemen saja yakni departemen dalam negeri, departemen kepolisian dan departemen kesejahteraan social yang semuanya bertanggung jawab kepada seorang *Syu-cookan*.

Dalam struktur ke pemerintahannya pemerintah militer Jepang tidak pernah melibatkan orang-orang pribumi sebagai pejabat pemerintahannya



Figur 1. Struktur Pemerintahan Palembang Shi. Sumber: Isnaeni, 2008: 36

hal ini dikarenakan adanya rasa sosial yang tinggi bahwasannya orang-orang Jepang lebih memiliki kedudukan dan lebih terhormat dibandingkan dengan orang-orang pribumi (Praptanto, 2013:14). Peranan seorang pribumi hanya terbatas sampai kepada tingkatan *Gun-co* (Wedana/Kecamatan) saja, struktur pemerintah mulai dari *Gun-co*, *son-co*, *ku-coo*, *Aza* dan *Gumi* semuanya dijabat oleh orang-orang pribumi dengan kriteria untuk *Gun-coo* dan *Son-co* harus berasal dari orang-orang elit tradisonal lokal setempat (anak bangsawan, anak Pasirah, Pembarab dan sebagainya) untuk pejabat *Gun-coo* Palembang misalnya dijabat oleh Raden A. Rachman Bakri dan ditingkat daerah ada Abdul rozak, sementara untuk *ku-coo*, *aza* dan *gumi* adalah orang-orang yang dianggap memiliki kesetiaan paling tinggi terhadap pemerintah militer Jepang (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996: 125).

Kebijakan Pemerintahan Palembang Shi

Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang yang sangat singkat, yang hanya berusia kurang lebih 3,5 tahun lamanya pemerintah militer Jepang tidak terlalu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang selalu berkaitan dengan kegiatan militer, baik itu kebijakan di bidang ekonomi, Pendidikan, pembangunan Infrastruktur dan kebijakan-kebijakan lainnya. Pada sub bab materi kali ini penulis akan lebih banyak membicarakan tentang kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang pembangunan infrastruktur namun meskipun begitu, penulis tetap akan membahas mengenai kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah militer yang dirasa juga cukup penting seperti misalnya kebijakan militer pemerintah Jepang di kota Palembang dan juga kebijakan Ekonomi.

Kebijakan Bidang Pembangunan Infrastruktur

Pada masa pemerintahan *Palembang Shi* pada tahun 1942-1945 diketahui bahwa pemerintah militer Jepang tidak terlalu banyak melakukan pembangunan di bidang infrastruktur hal ini disebabkan karena fokus utama pendudukan pemerintahan militer Jepang di Palembang ialah hanyalah sebatas kebutuhan perang dan militer saja, namun meskipun begitu peninggalan-peninggalan pemerintahan militer Jepang di Palembang masih dapat kita jumpai dan kita temui, bahkan masih ada sebagian dari hasil pembangunan infrastruktur tersebut yang masih bisa kita gunakan hingga saat ini.

Hanafiah (1998: 201) mengatakan bahwa selama masa pendudukan Jepang di Palembang tidak banyak yang dibangun oleh pemerintah Jepang, semua yang dibangun oleh pemerintah militer Jepang diarahkan untuk persiapan perang pasukan militer Jepang, adapun yang dibangun oleh pemerintah militer Jepang pada waktu itu diantaranya adalah :

1. Perluasan lapangan pesawat udara di Talang Betutu

2. Pembangunan lapangan pesawat udara di wilayah sungai buah Sekojo
3. Perbaikan dan pelebaran jalan menuju ke Bandar udara Talang Betutu (jalan Kolonel. H. Barlian saat ini)
4. Pembukaan jalan yang dimulai dari simpang Masjid yakni jalan TP. Rustam Effendi saat ini sampai ke Simpang Charitas.

Hal yang sama juga dikatan oleh Irwanto (2010: 54) yang mengatakan bahwa dalam pemerintahan yang relative singkat pemerintahan *Palembang Shi* mampu memperlebar dan memperbaiki jalan jalan tengkuruk mulai dari simpang Masjid Agung sampai ke simpang rumah sakit Charitas. Selain itu juga pemerintahan *Palembang Shi* juga melakukan pembangunan terhadap bandar udara Talang Betutu dan bandar udara Sekojo dan untuk mempermudah akses menuju ke bandar udara tersebut pemerintah militer Jepang membangun dan memperbaiki akses jalan untuk menuju ke Bandar udara tersebut yang dibangun sepanjang 12 Km yang di mulai dari jalan Tengkuruk dan jalan tersebut dinamai dengan jalan Miaji, Miaji sendiri merupakan nama seorang *Shi-co* yang memerintah pada saat itu.

Tak hanya itu saja pemerintah militer Jepang juga membangun banyak bunker-bunker pertahanan yang ditujukan untuk menghalau serangan musuh yang akan menyerang kota Palembang. Untuk kota Palembang sendiri bangunan Bunker ini cukup unik karena berdasarkan posisi atau letaknya bunker di kota Palembang di kelompokkan menjadi dua jenis; yakni bunker yang terletak di daerah perbukitan dan bunker yang terletak di wilayah pertambangan minyak. Untuk bunker yang terletak di wilayah perbukitan biasanya berbentuk persegi ataupun berbentuk seperti huruf U dan untuk bunker yang terletak di daerah pertambangan minyak berbentuk persegi dan mempunyai halaman yang cukup luas disekitarnya serta terdapat kedudukan meriam disekitar bunker-bunker tersebut (Nes, 2018: 104). Sementara itu bunker yang terletak di daerah perbukitan memiliki ruang-ruang yang cukup luas serta terdapat ventilasi dan berfungsi untuk mengintai musuh dari dalam ruangan dengan atap yang berbentuk datar dan bangunan terkubur oleh tanah sedangkan untuk bunker di wilayah pertambangan merupakan symbol pemerintah militer Jepang bahwa wilayah itu telah diduduki oleh pemerintah militer Jepang sekaligus berfungsi sebagai tempat pertahanan musuh (<https://travel.tempo.co/read/1187194/wisata-sejarah-palembang-bunker-jepang-konon-tembus-sungai-musi#S7Z85Q7kAgZuTB2Y.41> diakses 08-04-2019). Adapun bangunan-bangunan bunker yang terdapat di kota Palembang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bunker Charitas

Bunker ini terletak di jalan Jendral Sudirman saat ini tepatnya berada di depan Rumah Sakit RK. Charitas dan terletak pada titik koordinat S 02°58'32.3 E 104°45'12.1. dari bentuk dan lokasi bunker ini berada di perkiraan bahwa

bunker ini merupakan bunker pertahanan tentara militer Jepang terletak di atas perbukitan dan berbentuk persegi, lokasi bunker yang berada di tengah kota menandakan bahwa bunker ini berfungsi sebagai banteng pertahanan terakhir pemerintah militer Jepang sebelum musuh akhirnya bisa memasuki wilayah ibu kota pemerintahan *Palembang Shi*. Selain sebagai banteng pertahanan bunker ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal pasukan tentara Jepang yang bertugas mengawasi pergerakan pasukan sekutu yang akan memasuki wilayah kota Palembang melalui udara, karena di dalam ruangan bunker terdapat ruang bawah tanah yang ke dalamannya berkisar kurang lebih 2 m

2. Bunker Jepang di jalan AKBP H. Umar (Goa Jepang)

Bunker ini terletak di Jalan AKBP H. Umar keluaran Ario Kemuning Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan berada di tengah-tengah pemukiman warga, bunker ini berada pada posisi S 02°57'11.1" E 104°44'18.2" dengan luas bangunan panjang 8,8 m, lebar 6,38 m dan tinggi 3,3 M. bunker ini sering juga disebut oleh warga sekitar sebagai Gua Jepang dikarenakan bentuknya yang berbentuk seperti Huruf U dan menyerupai mulut Gua, di atas Bunker terdapat semacam bangunan yang mirip dengan Cerobong diperkirakan cerobong ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara karena apabila melihat kondisi keadaan bunker berdasarkan lokasinya bunker ini terletak di areal perbukitan dan sebagian bangunan masih tertutup oleh tanah. Bunker ini sendiri difungsikan sebagai banteng pertahanan Jepang untuk mengintai pergerakan pesawat sekutu yang terbang melintasi kota Palembang dan berfungsi untuk menghalau serangan sekutu yang datang dari arah Bandar udara Talang betutu selain itu juga sebagai tempat tinggal tentara pasukan Jepang yang berjaga-jaga di areal sekitar karena di dalam bunker ini terdapat dua buah ruangan yang berfungsi sebagai kamar.

3. Bunker Karya Ibu

Bunker ini terletak di jalan Rimba kemuning kompleks SMP Karya Ibu dan berada pada titik koordinat S 02°57'07.5" E 104°44'19.7" bentuk bangunan bunker ini berbentuk persegi dan saat ini telah menjadi tempat tinggal warga sekitar, berdasarkan bentuk dan lokasi tempat ditemukannya bunker ini, besar kemungkinan bahwa bunker ini hanya berfungsi sebagai kamp tentara militer Jepang, jarak dari bunker ini ke bunker AKBP H. Umar tidak terlalu jauh hanya berjarak kurang lebih berkisar 900 meter saja. Dan bunker ini sendiri tidak memiliki ruangan di dalamnya hanya berbentuk persegi empat saja tanpa ada sekat-sekat kamar di dalamnya.

4. Bunker Jepang Jalan Joko

Bunker ini berada di Jalan Joko kelurahan Talang Semut Kecamatan Ilir Barat II Bukit Batu Kota Palembang dan Berada tepat di sebelah gereja ayam

bekas peninggalan pemerintah Hindia Belanda, bunker ini berada pada titik koordinat S 02°59'32.3" E 104°45'06.1". Berdasarkan posisi bunker ini berada, bunker ini terletak di bawah tanah dengan kedalaman berkisar 2,4 m di bawah permukaan tanah, bunker ini dulunya berfungsi sebagai kamp pemerintah militer Jepang dan berfungsi sebagai tempat pengintaian musuh dan tempat menyerang musuh lewat udara, dulunya di depan bunker ini sendiri terdapat bangunan berupa tiang pemancar antenna Radio Jarak jauh UHF/VHF yang tersambung langsung ke pusat pemerintahan Jepang di Sumatera yakni Bukittinggi yang berfungsi sebagai system radio untuk menghubungi dan meminta bantuan dari pemerintah pusat ketika adanya ancaman pesawat maupun serangan dari pihak pasukan sekutu yang sinyalnya telah ditangkap oleh radar radio (<http://beritapagi.co.id/2018/06/18/battle-of-palembang-kisah-penyerangan-pasukan-jepang-di-kilang-minyak-plaju.html> diakses 08-04-2018). Di dalam bunker ini sendiri terdapat banyak sekali ruangan yang diperkirakan sebagai kamar-kamar tentara Jepang yang berjaga di bunker tersebut, setidaknya ada 5 buah kamar di dalam bunker tersebut dan terdapat 1 ruangan utama serta 1 kamar kecil dan ventilasi udara yang cukup baik sehingga meskipun keberadaan bunker terletak di bawah permukaan tanah, namun suplay udara dan oksigen tetap diperhatikan, hal ini dibuktikan dengan terdapat banyaknya ventilasi di bagian dalam bunker tersebut.

5. Bunker Pertahanan Udara Lorong Sikam

Bunker ini terletak di jalan lorong Sikam Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Plaju, berada pada posisi S 02°59'.750' E 104°47'.808' bunker pertahanan milik pemerintah militer Jepang ini difungsikan sebagai tempat pengawasan dan penjagaan areal pertambangan minyak sungai gerong dan plaju karna lokasi bunker berada di sekitaran wilayah *Asano Butai* selain itu yang menjadi ciri ataupun penanda bahwasannya bunker ini difungsikan sebagai tempat pengawasan dan penjagaan wilayah pertambangan minyak sungai gerong dan plaju adalah disekitar bunker terdapat 5 buah bangunan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan meriam yang mampu menembak jauh ke udara, arah serangan meriam sendiri diarahkan ke udara karena gerak pasukan sekutu saat itu adalah melalui serangan udara dan selain itu juga terdapat 2 buah bangunan lagi yang berbentuk persegi dan digunakan sebagai tempat penyiksaan bagi mereka yang berani melanggar aturan pemerintah Jepang.

6. Bunker Jepang Jakabaring

Bunker ini berada di jalan simpang tiga Binangun/Ral 7 Jakabaring dan berada tepat di seberang MAN 1 Palembang berada pada titik koordinat S 03°02.685' E 104°47.620' dan sudah tidak berbentuk lagi. Bunker ini sendiri telah lama dihancurkan oleh warga setempat dan saat ini disekitaran bunker banyak ditumbuhi oleh semak belukar. Tidak banyak informasi yang penulis dapatkan

mengenai bunker ini namun jika dilihat dari lokasi keberadaan Bunker ini dibuat, di duga kuat bunker ini dulunya berfungsi sebagai asrama tentara militer jepang karena tidak ditemukan tempat tinggalan lainnya disekitatan bunker tersebut. Dan apabila melihat lokasi serta keberadaan bunker yang telah hilang maka kuat dugaan bahwa bunker tersebut hanya terbuat dari batu merah tanpa dilakukan pengeceroran yang kuat seperti bangunan bunker Jepang lainnya pada umumnya.

Kebijakan Bidang Militer

Masih sama dengan kebijakan sebelumnya kebijakan militer kali ini juga dikeluarkan dalam rangka untuk mendukung kebijakan militer pemerintah Jepang dalam rangka menghadapi ancaman dan serangan musuh. Di dalam kebijakan militer ini yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang adalah membentuk suatu organisasi militer yakni *Giyugun* yang diharapkan anggotanya kelak mampu membantu pemerintah jepang menghadapi ancaman musuh. Pemerintah Jepang mulai merekrut anggota *Giyugun* pada akhir September 1943 dan hampir bersamaan dengan pembukaan pusat pelatihan PETA di Jawa. Untuk wilayah Sumatera sendiri terdapat beberapa tempat pendaftaran *Giyugun* seperti misalnya di wilayah Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Pembentukan *Giyugun* sendiri dilandasi oleh *Osamu Seirei* No. 44 tanggal 3 Oktober 1943 yang mengatur tentang pembentukan PETA karna pada dasarnya PETA dan *Giyugun* adalah sama hanya saja terdapat perbedaan penyebutan nama saja di mana untuk wilayah Sumatera menggunakan istilah Jepang sementara di wilayah Jawa menggunakan istilah Indonesia. selain itu perbedaan antara tentara Peta dan *Giyugun* adalah terdapat pada pangkat yang diberikan setelah perwira selesai menyelesaikan pendidikan militernya tersebut, di mana untuk lulusan Peta jabatan tertingginya adalah *Diadancho* (setingkat komandan Batalion) sementara perwira *Giyugun* jabatan tertingginya hanya sebatas *chudancho* (Setingkat Komandan kompi) (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2009: 69). Hal serupa juga diungkapkan oleh Lapien (1988: 107) yang mengatakan bahwa perbedaan lainnya antara PETA dan *Giyugun* adalah jika Peta terpusat pada satu wilayah pelatihan yakni di Bogor maka di Sumatera, *Giyugun* memiliki pusat latihan berbeda-beda dan tak saling berkomunikasi dan tidak terpusat. Adapun tabel komando militer dan pusat pelatihan *Giyugun* di wilayah Sumatera adalah seperti pada tabel 1.

Pembentukan *Giyugun* Palembang sendiri diikuti oleh hampir 300 orang pemuda dan masing-masing dari mereka ada yang ditempatkan di pusat latihan *giyugun* di Lahat dan ada juga yang ditempatkan di pusat latihan *Giyugun* di Talang Betutu (Said, 1992: 52). Pendaftaran untuk angkatan pertama dibuka sekitar bulan Oktober 1943 sebagian besar anggota *Giyugun* yang mendaftar berasal dari keluarga Pasirah maupun kelas bangsawan.

Tabel 1. Komando Militer dan Pusat Pelatihan *Giyugun* di wilayah Sumatera

No.	Wilayah	Satuan militer	Pusat Pelatihan
1	Aceh	Divisi 2 Kono-e (Miya)	Kutaraja (1943)
2	Sumatera Timur (Medan dan Tapanuli)	Brigade Gabungan Tentara Angkatan Darat ke-25	Medan (1943) Sibolga (1943)
3	Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau, dan Kerinci)	Divisi 4 (Yodo) dan Markas Besar Tentara Angkatan Darat k-25	Padang (1943) Bukittinggi (1944)
4	Sumatera Selatan (Palembang, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung)	Brigade Gabungan Tentara Angkatan Darat ke-26 yang bermarkas di Pagaralam	Pagaralam (1943) Karang Endah dan Palembang (1944)

Sumber: Zed, 2005: 32

Sementara itu Yusuf (2003: 14) mengatakan bahwa terdapat 2 jenis *Giyugun* yang ada di Sumatera Selatan diantaranya yakni *Giyugun* darat (*Giyugun Kanbu*) dan *Giyugun* Udara di mana untuk pusat pelatihan *Giyugun* darat berada di daerah Pagaralam, Pagaralam sendiri terpilih sebagai pusat latihan *Giyugun Kanbu* karena disebabkan oleh letak geografis wilayahnya yang berada di daerah dataran tinggi sehingga memiliki hawa yang sejuk dan daerah yang subur dengan demikian pemerintah militer Jepang tidak perlu khawatir lagi dengan ketakutan-ketakutan akan kekuarangan bahan makanan sementara itu pusat pelatihan *Giyugun* udara berada di daerah Talang Betutu, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan *Giyugun* udara sangatlah terbatas jumlahnya dan adapun tugas dari *Giyugun* udara ini adalah untuk pengamanan kawasan lapangan terbang.

Kebijakan Bidang Ekonomi

Sejak awal kedatangannya pemerintah militer Jepang telah menetapkan kebijakan ekonomi yang diatur oleh Pemerintah *Palembag Shi* adalah untuk dapat menjadikan kota Palembang sebagai sebagai suatu wilayah ekonomi perang yang dapat menunjang segala sesuatu yang yang berkaitan dengan kebutuhan perang pemerintah militer Jepang guna menghadapi serangan maupun ancaman dari pasukan sekutu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zen (2012: 57) yang mengatakan bahwa pemerintah militer Jepang lebih mementingkan tujuan ekomi perangnya di Palembang daripada tujuan politiknya, hal inilah yang kemudian membuat pemerintah militer Jepang berusaha untuk semaksimal mungkin mengamankan sumber-sumber daya yang dianggap strategis (Minyak dan perekebunannya). Jika dillihat dari pernyataan Zen di atas Nampak jelas bahwa yang menjadi fokus utama pemerintahan militerr Jepang di wilayah Palembang adalah hasil Minyak buminya dan hal inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah militer Jepang dalam mengeluarkan setiap kebijakannya serta menyusun susunan hirarkris birokrasi yang berbeda antara Jawa dan Sumatera, bahkan Antara sesama wilayah wilayah di Sumatera.

Zed (2003: 243) mengatakan bahwa Palembang dengan sumber minyak buminya (sungai Gerong dan Plaju) menjadi fokus utama pemerintahan militer Jepang, hal ini dikarenakan lebih dari separuh produksi minyak bumi pemerintah Hindia Belanda berasal dari kota Palembang. Pada tahun 1942 saja Instalasi pengelolaan minyak Plaju memberi sekitar 9.000.000 barel atau sekitar 82% dari total produksi minyak yang berjumlah sekitar 11.200.000 barrel per tahun dan pada saat Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan kota Palembang terdapat kurang lebih 250.000 ton minyak yang tersisa di dalam tanki-tanki penyimpanan minyak Plaju, ukuran ini termasuk dalam kategori yang cukup besar untuk katategori wilayah penghasil minyak yang berhasil di duduki oleh pemerintah militer Jepang, sebab ketika Jepang masuk ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, pemerintah Hindia Belanda terlebih dulu melakukan pembumi hangusan terhadap kilang minyak di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur sehingga tidak tersisa cukup banyak paokan minyak lagi di daerah tersebut. Adapun tabel perbandingan produksi minyak kota Palembang dengan kota lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel produksi minyak tahun 1943

No.	Daerah Produksi	Jumlah (dalam barrel)
1	Plaju, Palembang	20.460.000
2	Balikpapan, Kalimantan	5.000.000
3	Wonokromo, Jawa	1.000.000
4	Lain-Lain	14.840.000
Total		41.300.000

Sumber: Zed, 2003: 245

Kilang minyak Plaju Palembang (termasuklah juga di dalamnya wilyah Sungai Gerong) menepati urutan pertama dengan total produksi sebesar 20.460.000 barrel per tahun, sementara itu posisi terbesar kedua ditempati oleh kota Balikpapan dengan total produksi mencapai 5.000.000 barrel per tahun, serta Wonokromo dengan total produksi 1.000.000 barrel pertahun. Data lain diperoleh dari Soegondo (Tanpa Tahun, 191) yang mengatakan bahwa daerah terpenting pengasil minyak di Indonesia saat itu adalah wilayah Sumatera dengan kota Palembang sebagai penghasil minyak terbesarnya (Sungai Gerong dan Plaju). Adapun tabel produksi minyak di wilayah Indonesia saat itu adalah seperti pada tabel 3.

Dari data pada tabel 3 dapat kita lihat bahwa produksi minyak terbesar ditempati oleh Palembang dengan total produksi mencapai 45.000 barrel perhari (1 Barrel=165 liter) dan jika dikalkulasikan pertahun maka total produksi minyak di kota Palembang mencapai 16.425.000 barrel per tahun atau setara dengan 2.710.125.000 liter per tahun, jauh melebihi produksi

Tabel 3. Produksi Minyak di Indonesia

Sumatera		Jawa		Kalimantan	
Sumatera Utara	40.000.000 barrel setahun	Jawa Tengah (Cepu)	6.000.000 barrel setahun	Tarakan	12.500.00 barrel setahun
Palembang (Plaju dan Sungai Gerong)	45.000 barrel sehari	Jawa Timur (Wonokromo)	1.000 barrel setahun	Balikpapan	42.000 barrel sehari

Sumber: Soegondo, tanpa tahun: 196

minyak Tarakan yang hanya mencapai 12.500.000 barrel pertahun atau setara dengan 2.062.500.00 liter pertahun dan Balikpapan yang mencapai 15.330.000 barrel perhari (2.529.450.000 liter perhari). Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah militer Jepang menargetkan Palembang harus berada di bawah kendali pemerintah Jepang dan wilayah pertama di Sumatera yang harus di ambil alih kekuasaannya dari tangan pemerintah Hindia Belanda.

Di awal tahun 1945 pemerintah militer Jepang kembali membuka pabrik pengilangan minyak di kota Palembang yakni di kawasan Talang Kerikil Kenten, kilang minyak ini memang tidak sebesar kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong namun cukup membantu untuk mesuplay pasokan minyak militer Jepang yang semakin hari semakin membutuhkan lebih banyak lagi suplay minyak. Kilang minyak Kenten ini terhubung dengan kilang minyak Plaju yang tersambung dengan pipa *Crude-oil* dari lapangan Kluang dan melalui sungai Kenten hingga sampai di kilang Plaju (Gadjahnata, 2000: 33). Sementara itu untuk produksi minyak sendiri, kilang minyak Kenten mampu menghasilkan bensin berkisar sebesar 3.000 ton/ perhari. Cukup besar untuk kategori sebuah kilang kecil.

Penutup

Hadirnya pemerintahan militer Jepang di Indonesia dan di Palembang khususnya telah memberikan sebuah gambaran umum bahwa ternyata meskipun Jepang terkenal akan sistem dan strategi militer perangnya yang hebat mereka juga tidak melupakan tentang struktur pemerintahan di negara-negara yang mereka duduki. Meskipun pada dasarnya mereka tetap menggunakan kekuatan militer dan orang-orang militer di dalam struktur pemerintahan namun pemerintah militer Jepang sangatlah serius mengenai pengaturan negara kekuasaannya. Dari sinilah juga dapat kita ketahui bahwa meskipun hanya 3,5 tahun lamanya namun pendudukan pemerintah militer Jepang meninggalkan kesan yang cukup berarti bagi Indonesia pada umumnya dan Palembang khususnya hal ini dapat kita jumpai dari masih banyaknya peninggalan-peninggalan Jepang yang masih utuh dan kita teruskan seperti Bunker, Pembentukan PETA dan *Giyugun* oleh Jepang yang menjadi awal sejarah berdirinya TNI dan lain-lain sebagainya.

Referensi

- Abdullah, Ma'moen (1992). *Sejarah daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan pembinaan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat (2009). *PETA dan Peranannya sebagai salah satu Cikal Bakal TNI*. Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat
- Gadjahnata (2000). *Sejarah Teknik Minyak Plaju 1942-1945 Kepeloporan Semangat Juang-1945*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Hanafiah, Dhohan (1988). *82 Tahun Pemerintahan Kota Palembang*. Palembang: Humas Kotamadya Daerah TK. II Palembang.
- Hanafiah, Dhohan. dkk (2001). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Di Kota Palembang*. Pemerintah Kota Palembang.
- Irwanto, Dedi (2010). *Venesia Dari Timur*. Yogyakarta: Ombak
- Isnaeni, Hendri F dan Apid (2008). *Romusha: Sejarah Yang Terlupakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Lapian, A.B (1988). *Di Bawah Pendudukan Jepang*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Moedjanto (1988). *Indonesia Abad ke 20 Bagian 1: Dari kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, A.H (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1: Proklamasi*. Bandung: Disjarah AD dan Angkasa
- Praptanto, Eko (2013). *Sejarah Indonesia Zaman Pendudukan jeang dan Kemereekaan Indonesia*. Jakarta: Bina Sumber Daya Mipa.
- Poesponegoro, Marwati Djoened (2011). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sagimun, M. D (1985). *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: PT Inti Idayu Press.
- Said, Abi Hasan (1992). *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah: Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera*. Jakarta: Yayasan Krama Yudha.
- Soegondo, R.M.G. Tanpa Tahun. *Ilmu Bumi Militer Indonesia*. Jakarta: Pembibing.
- Yusuf, Syafruddin (2003). *Sejarah Dan Peranan SUBKOSS Dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950)*. Palembang: Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Sumatera Selatan.
- Zed, Mestika (2003). *Kepialangan Politik dan revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Zed, Mestika (2005). *Giyugun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta: LP3ES
- Zubir, Dkk (2012). *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Selatan Dalam Kajian Sosial dan Ekonomi*. Padang: BPSNT Padang Press.

Artikel Jurnal

- Nes, M. R (2019). Tipologi Instalasi Militer Jepang Di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Siddhayatra*, 23(2), 102-113.

Artikel dari Media Elektronik

- <http://beritapagi.co.id/2018/06/18/battle-of-palembang-kisah-penyerangan-pasukan-jepang-di-kilang-minyak-plaju.html> diakses 08-04-2018
- <http://beritapagi.co.id/2018/06/18/battle-of-palembang-kisah-penyerangan->

[pasukan-jepang-di-kilang-minyak-plaju.html](#) diakses 08-04-2018
<https://travel.tempo.co/read/1187194/wisata-sejarah-palembang-bunker-jepang-konon-tembus-sungai-musi#S7Z85Q7kAgZuTB2Y.41> diakses 08-04-2019